

**JURNAL CYBER PR**  
**Fakultas Ilmu Komunikasi**  
**Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

**Konstruksi *Framing* Bangkok Post atas Pergeseran Kebijakan Ganja di Thailand 2025**

**Hilmi Syafiq\*, Cecep Hidayat**

Universitas Indonesia

Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424

\*Email Korespondensi: hilmi.syafiq@ui.ac.id

Submitted: February 2026, Accepted: April 2026, Published: June 2026

---

**Abstract** - This study examines the pattern adopted by Bangkok Post in framing the cannabis restriction policy in Thailand in 2025. Using a qualitative approach and content analysis on 10 news articles, the paper examines the text through Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's framing theory, integrated with Arnstein's ladder of participation and Habermas's deliberative democracy. The analysis reveals that the Bangkok Post took a noticeably critical stance toward the new regulation. The coverage leaned heavily toward the negative economic impacts on small business owners and local farmers, putting them and activists at the center of the story. On the other hand, the government's point of view was mostly presented in a dry, rigid, and purely technocratic way. Script and rhetorical structures played the biggest role here, using emotional language to drive home the narrative that this sudden policy had sparked a real crisis in the industry. Applying Arnstein's and Habermas's frameworks further proves that the policy reflects a top-down approach that neglected open public discussion and marginalized stakeholder participation. Ultimately, this research shows how the media can act as a political force that actively shapes public policy narratives.

**Keywords** Bangkok Post; Cannabis; Media Framing; Public Policy; Thailand

**Abstrak** - Penelitian ini mengulas bagaimana Bangkok Post membingkai ulang kebijakan pembatasan ganja di Thailand yang mendadak berubah pada tahun 2025. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis isi terhadap 10 artikel berita, studi ini membedah teks menggunakan teori *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, serta didukung oleh perspektif partisipasi publik Arnstein dan demokrasi deliberatif Habermas. Hasilnya menunjukkan bahwa Bangkok Post mengambil sikap yang cenderung kritis terhadap kebijakan baru tersebut. Media tersebut lebih banyak menyoroti dampak buruk ekonomi yang langsung memukul para pelaku usaha kecil dan petani ganja, serta memosisikan mereka dan para aktivis sebagai aktor utama di dalam berita. Sebaliknya, argumen dari pihak pemerintah justru ditampilkan secara kaku dan sebatas penjelasan aturan saja. Struktur skrip dan retorika menjadi bagian yang paling dominan lewat pilihan kata yang emosional untuk memperkuat kesan bahwa kebijakan ini telah memicu krisis besar. Analisis berbasis teori Arnstein dan Habermas mempertegas bahwa aturan ini dipaksakan dari atas ke bawah karena mengabaikan ruang diskusi yang terbuka serta meminimalkan partisipasi kelompok terdampak. Studi ini menyimpulkan bahwa media massa bisa menjadi aktor politik aktif yang ikut mengontrol jalannya kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Bangkok Post; Ganja; Kebijakan Publik; Pembungkai Media; Thailand

---

## Pendahuluan

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menganut sistem demokrasi monarki konstitusional. Lazimnya dalam suatu sistem demokrasi, terdapat pilar-pilar yang menopang terejawantahkannya demokrasi tersebut, dan salah satu dari pilar yang turut berkontribusi adalah media. Menurut Cook (2005) posisi media tidak lagi hanya mewartakan semata, tetapi juga mengatur posisinya terhadap isu tertentu dalam berita yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen bagi media untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui upaya memengaruhi opini publik. Salah satu isu kebijakan publik yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian di Thailand adalah kebijakan terkait ganja, yang mengalami perubahan regulasi secara signifikan dan memunculkan berbagai perdebatan di ruang publik.

Ganja (*Cannabis Sativa*) telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Thailand, terutama di wilayah pedesaan. Dalam tradisi medis Thailand, ganja digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk mengatasi berbagai macam penyakit (Laohavanich, 2022). Bahkan, dalam beberapa dekade sebelum adanya regulasi ketat, ganja sering kali digunakan secara terbuka baik untuk keperluan pengobatan maupun kegiatan sosial tertentu (Indriani & Madjid, 2022). Situasi berubah pada 1979 ketika Thailand mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai benda terlarang. Kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh posisi Thailand di kawasan *Golden Triangle* serta tekanan internasional terkait pemberantasan narkotika (Masyhadi, 2024).

Perubahan wacana mengenai ganja mulai terjadi ketika meningkatnya perhatian global terhadap potensi medis tanaman tersebut. Pada tahun 2018 pemerintah Thailand mengklasifikasikan ganja sebagai obat terkontrol yang dapat digunakan untuk kepentingan medis dan penelitian, menjadikan Thailand negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk tujuan medis (Masyhadi, 2024). Kebijakan ini berkembang lebih jauh pada tahun 2022 ketika pemerintah menghapus ganja dari daftar narkotika melalui *Notification Re: Specification of Type 5 Narcotics B.E. 2565*, sehingga memungkinkan konsumsi publik dengan batas kandungan THC tertentu (Charoenwisedsil et al., 2023). Kebijakan tersebut menjadikan Thailand sebagai negara Asia pertama yang melegalkan ganja dengan akses yang lebih bebas.

Dikeluarkannya ganja dari daftar narkotika memberikan dampak ekonomi positif dengan munculnya ribuan pelaku usaha ganja di berbagai wilayah (Head, 2023). Kebijakan tersebut juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru, yang diperkirakan menyerap sedikitnya 8.300 tenaga kerja (Lertrujwanich et al., 2024). Namun demikian, perubahan arah kebijakan terjadi ketika pemerintahan dipimpin oleh Paetongtarn Shinawatra. Melalui Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Thepsuthin, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan pembatasan konsumsi ganja melalui *Ministerial Regulation on Controlled Herbal Plants (Cannabis) B.E. 2568 (2025)* yang disahkan pada 26 Juni 2025. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan ganja hanya diperbolehkan untuk tujuan medis dengan resep dokter (Office Narcotics Control Board, 2025). Kebijakan tersebut pada dasarnya merepresentasikan pergeseran arah dari kebijakan legalisasi ganja yang diberlakukan pada 2022. Pergeseran arah kebijakan berupa pembalikan kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha ganja, terutama terkait potensi penutupan bisnis serta kemungkinan penerapan sanksi pidana di masa mendatang.

Perubahan arah suatu kebijakan publik, dalam hal ini berupa pembalikan, acapkali memunculkan berbagai respons di ruang publik. Dalam situasi demikian, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memosisikan diri terhadap isu melalui konstruksi pemberitaan. Salah satu mekanisme yang digunakan media dalam memaknai suatu peristiwa adalah melalui praktik *framing*. Gamson &

Modigliani (1989) menyatakan bahwa *framing* merupakan proses pembentukan makna melalui paket interpretatif (*interpretative packages*) yang disusun dalam narasi media sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu. Melalui konstruksi tersebut, media dapat menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa sekaligus mereduksi aspek lainnya, sehingga membentuk kerangka pemahaman tertentu di kalangan publik.

Beranjak kepada kerangka teori, penelitian ini akan menggunakan teori *framing* dalam melihat kecenderungan posisi media mengonstruksikan narasi atas kebijakan tersebut. Pan & Kosicki (1993) mengajukan model analisis terkait *framing* yang terdiri dari beberapa perangkat analisis. Pertama adalah struktur sintaksis yang berkaitan dengan bentuk penyusunan suatu peristiwa oleh media menjadi sebuah berita, lebih lanjut lagi bentuk penyusunan tersebut berupa pernyataan, pengamatan, opini, dan kutipan. Bentuk sintaksis yang paling umum digunakan adalah diawali dengan judul atau *headline*, lalu *lead*, episode, latar, dan diakhiri dengan penutup. Dalam pola demikian, bagian yang ditempatkan di awal memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan bagian-bagian yang berada di bawahnya.

Perangkat kedua adalah struktur skrip dari sebuah berita, yang berkaitan dengan cara media mengemas peristiwa dalam bentuk alur pemberitaan. Struktur tersebut dianalisis melalui unsur 5W+1H (*Who, What, When, Where, Why, dan How*). Melalui unsur-unsur tersebut dapat dilihat bagaimana media mendefinisikan peristiwa, pihak-pihak yang ditampilkan sebagai aktor utama, serta penjelasan mengenai sebab dan konsekuensi dari peristiwa yang diberitakan. Dengan demikian, struktur skrip dapat menunjukkan kecenderungan konstruksi makna yang dibangun media terhadap suatu isu yang diberitakannya.

Selanjutnya adalah struktur tematik, yang memperlihatkan bagaimana media mengorganisasikan informasi, menempatkan fakta tertentu sebagai bagian yang lebih menonjol, serta menghubungkan berbagai peristiwa atau pernyataan sehingga menghasilkan alur narasi yang koheren. Dengan melakukan pengamatan terhadap pola tematik tersebut, dapat diidentifikasi pola dari media mengonstruksikan argumentasinya dan menekankan sudut pandang tertentu dalam pemberitaan yang disajikan kepada publik.

Terakhir adalah struktur retorik, yang berkaitan dengan penekanan makna tertentu melalui pilihan kata atau frasa untuk menonjolkan aspek tertentu serta membentuk citra yang diinginkan media. Keseluruhan perangkat analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi posisi politik dari media terhadap peristiwa yang diberitakan. Dalam konteks penelitian ini, posisi politik media tidak semata-mata dipahami sebagai pernyataan eksplisit berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan, melainkan sebagai kecenderungan sikap institusional yang tercermin melalui konstruksi *framing* dalam pemberitaan.

Penelitian terkait konstruksi *framing* media terhadap pemerintah ataupun produk dari pemerintah itu sendiri, yang salah satunya adalah kebijakan, memiliki cakupan yang cukup luas. Penelitian dari Maida et al. (2025) menemukan pola media dalam mengonstruksikan makna dan mengartikulasikan kepentingannya. Dalam penelitiannya, acara Bocor Alus pada media Tempo.co membangun *framing* bahwa pemerintah sebagai entitas yang sarat intrik dan kompleksitas komunikasi internal. Terkait dengan media dan ganja, penelitian Amina et al. (2024) menemukan bahwa penggambaran ganja sebagai zat psikotropika dalam program Rosi di Kompas TV dipengaruhi oleh kecenderungan posisi politik kontra-ganja yang juga digaungkan oleh pemerintah. Dalam konteks kebijakan ganja di Thailand, Laohavanich (2022) menemukan bahwa kebijakan penghapusan ganja dari golongan narkotika pada tahun 2022 ternyata memiliki masalah administratif, yakni terjadinya kerumitan regulasi dalam rangka menjalankan bisnis ganja. Kerumitan regulasi yang dimaksud adalah bahwa terdapat enam lisensi yang perlu didapat oleh pengusaha dari tahapan pembukaan lahan hingga pemasaran.

Melalui telaah pustaka tersebut, ditemukan celah penelitian (*research gap*) bahwa pada penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait media dengan objek ganja itu sendiri,

yang demikiannya belum dibahas relasi media atas kebijakan ganja, khususnya dalam konteks Thailand pada kebijakan pembatasan konsumsi ganja 2025 yang merupakan pembalikan dari kebijakan pada tahun 2022. Pun jika membahas kebijakannya, penelitian lebih menitikberatkan pada masalah administratif dalam kebijakan tersebut, yang selanjutnya memengaruhi aspek ekonomi politiknya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi *gap* tersebut dengan menjawab pertanyaan “Bagaimana konstruksi *framing* dalam pemberitaan Bangkok Post mengenai kebijakan pembatasan konsumsi ganja di Thailand pada tahun 2025 mengindikasikan kecenderungan posisi media dalam isu tersebut?”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan posisi media atas suatu isu melalui konstruksi *framing* dalam berita yang dipublikasikannya. Kontribusi dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperkaya kajian politik media, khususnya dalam memahami kecenderungan posisi suatu media melalui *framing* yang dikonstruksikannya terhadap kebijakan publik, dalam konteks ini terkait pembalikan kebijakan terkait konsumsi ganja di Thailand. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *framing* Pan & Kosicki (1993). Media yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Bangkok Post, salah satu media arus utama Thailand yang menerbitkan berita dalam bahasa Inggris sejak 1946. Pemilihan media tersebut didasarkan pada reputasi dan luasnya jangkauan pembaca, baik di Thailand maupun di tingkat internasional. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Nielsen et al. (2025), Bangkok Post memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 66% dari 2.003 responden, menempatkannya sebagai media dengan tingkat kepercayaan tertinggi kedua di antara media yang dikaji.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dengan artikel berita sebagai data utama. Kemudian sumber sekunder lainnya, seperti artikel jurnal, tesis, buku, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang telah diterbitkan juga digunakan dalam rangka mendukung proses validasi data temuan serta analisisnya. Berdasarkan klasifikasi Creswell (2014), sumber-sumber demikian dapat dikategorikan sebagai dokumen publik (*public documents*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang dimaksudkan untuk mendalami konteks, situasi, dan interaksi dari suatu fenomena.

Mengacu pada prosedur analisis data kualitatif yang dijelaskan Neuman (2014), penelitian ini secara sistematis mengorganisasi dan mengkaji artikel yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola-pola detail dari artikel berita yang telah disortir sebelumnya. Adapun teknik analisis artikel yang akan dilakukan adalah *content analysis* atau analisis isi konten, yang dapat dimaknai sebagai teknik analisis untuk menginterpretasikan kata atau konsep yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks (Arafat, 2018).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi teks pada media Bangkok Post. Pengumpulan berita dibatasi pada rentang waktu 26 Juni hingga 31 Juli 2025, bertepatan dengan momentum pengesahan kebijakan pembatasan ganja oleh Menteri Somsak Thepsuthin. Peneliti menggunakan kata kunci (*keyword*) “Cannabis” dan “Marijuana” untuk menghimpun artikel berita yang relevan. Berikutnya, teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan artikel berita yang dapat dianalisis. Objek penelitian yang dipilih terdiri dari 10 artikel berita dari Bangkok Post yang memenuhi kriteria berikut: (1) kategori *hard news* pada situs berita Bangkok Post bagian berita domestik (politik, sosial, atau bisnis), (2) secara eksplisit membahas kebijakan pembatasan konsumsi ganja di Thailand tahun 2025, (3) memuat pernyataan aktor politik atau pihak terdampak, serta (4) memiliki kedalaman substansi yang memadai melalui kedalaman pembahasan atau setidaknya isi artikel berjumlah lebih dari 100 kata. Jumlah 10 artikel berita dimaksudkan untuk memperdalam analisis. Mengingat setiap artikel dibedah secara komprehensif menggunakan empat perangkat analisis Pan & Kosicki

(Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris), jumlah tersebut dianggap representatif untuk mencapai saturasi data tanpa mengabaikan ketelitian analisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data dengan membandingkan temuan dalam satu artikel berita dengan berita lain. Selain itu, artikel berita juga akan diperiksa validitas isi kontennya dengan dokumen publik lainnya, seperti laporan dan peraturan perundang-undangan. Langkah ini selaras dengan prinsip triangulasi data yang dikemukakan Creswell (2014), yakni untuk meningkatkan kredibilitas hasil analisis, dapat melalui konfirmasi dari berbagai data yang diperbandingkan.

Proses analisis data temuan dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Teknis analisis dilakukan dengan membedah setiap artikel menggunakan empat perangkat analisis *framing* Pan & Kosicki (1993) yakni struktur sintaksis untuk melihat penyusunan peristiwa dalam judul dan badan berita, struktur skrip untuk membedah unsur 5W+1H, struktur tematik untuk mengamati organisasi informasi dan keterkaitan fakta, serta struktur retorik untuk meneliti pilihan diksi dan penekanan makna tertentu. Melalui rangkaian tahapan tersebut, peneliti akan mengidentifikasi pola *framing* yang konsisten untuk menyimpulkan posisi institusional media terhadap isu yang diteliti.

Beranjak kepada perspektif partisipasi publik, penelitian ini juga menggunakan konsep *Ladder of Participation* dari Arnstein (1969) sebagai perspektif pendukung dalam memahami relasi antara pemerintah dengan kelompok terdampak dalam proses pembentukan kebijakan. Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi publik memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari *non-participation*, *tokenism*, hingga *citizen power*. Melalui klasifikasi tersebut dapat ditelusuri sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas untuk melihat proses pembentukan kebijakan publik. Habermas menjelaskan bahwa kebijakan publik idealnya dibentuk melalui komunikasi yang rasional, terbuka, dan partisipatif di ruang public (Haliim, 2016). Dengan demikian, proses deliberasi menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dari kelompok yang terdampak.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kriteria penelitian yang telah ditetapkan, 10 berita yang memuat informasi terkait kebijakan pembatasan konsumsi ganja telah dihimpun. Kesepuluh berita tersebut dipilih oleh sebab secara langsung memuat pemberitaan mengenai kebijakan pembatasan ganja serta perkembangan isu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Adapun daftar berita yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Himpunan Berita Terkait Pembalikan Kebijakan Ganja di Bangkok Post

| No. | Tanggal Terbit | Judul                                            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 26 Juni 2025   | Thai cannabis industry thrown into chaos         |
| 2   | 27 Juni 2025   | Rule limits cannabis buds to medical use         |
| 3   | 2 Juli 2025    | Chafing under medical marijuana changes          |
| 4   | 3 Juli 2025    | Medical clinics to replace cannabis dispensaries |
| 5   | 7 Juli 2025    | Cannabis changes 'harm economy'                  |
| 6   | 8 Juli 2025    | Pro-cannabis rally ends, but they'll be back     |

|    |              |                                                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|
| 7  | 8 Juli 2025  | Cannabis curbs 'won't lead to monopoly'                |
| 8  | 18 Juli 2025 | Group seeks axing of new rules 'favouring big players' |
| 9  | 30 Juli 2025 | Weed networks still fuming                             |
| 10 | 31 Juli 2025 | Pro-cannabis group wants Somsak axed                   |

---

Sumber : Bangkok Post, diolah kembali oleh penulis.

### Analisis Berita 1

- Judul : Thai cannabis industry thrown into chaos
- Ringkasan : Thailand menjadi negara pertama yang melegalkan ganja pada 2022. Namun, pada 2025, perpecahan koalisi antara Partai Pheu Thai (pro-pembatasan) dan Partai Bhumjaithai (pro-legalisasi) mendorong disahkannya kebijakan pembatasan konsumsi ganja pada 26 Juni 2025. Kebijakan tersebut membatasi konsumsi hanya untuk kepentingan medis dengan resep dokter dan dinilai diberlakukan secara tiba-tiba, sehingga memicu kekacauan dalam industri ganja. Aktivis menilai kebijakan tersebut tidak akan menghentikan penggunaan rekreasional, melainkan justru berpotensi meningkatkan praktik jual beli resep dokter ilegal.
- Struktur Sintaksis : Judul berita "*Thai cannabis industry thrown into chaos*" menempatkan dampak kebijakan sebagai fokus utama pemberitaan. Penggunaan frasa "*thrown into chaos*" menegaskan pemberitaan diarahkan pada kondisi ketidakpastian yang dialami industri ganja akibat kebijakan pemerintah. Pada bagian *lead*, dijelaskan bahwa pemerintah Thailand mengesahkan kebijakan yang mengkriminalisasi kembali ganja setelah sebelumnya didekriminalisasi pada 2022. Informasi demikian menempatkan kebijakan pemerintah sebagai penyebab utama keguncangan industri yang telah berkembang pesat dalam tiga tahun terakhir.
- Struktur Skrip : Aktor (*Who*) yang ditonjolkan adalah pelaku bisnis, aktivis, dan pemerintah. Peristiwa yang terjadi (*What*) adalah pembatasan konsumsi ganja hanya untuk kepentingan medis yang tiba-tiba. Aspek waktu (*When*) ditunjukkan melalui situasi pasca-penerapan aturan baru yang berdampak secara langsung dalam waktu singkat, bahkan tanpa masa transisi, sementara lokasi (*Where*) terpusat di Thailand, khususnya area bisnis seperti Bangkok. Terjadinya peristiwa dilatar belakangi dengan adanya pembalikan kebijakan yang menimbulkan keresahan (*Why*). Adapun bagaimana peristiwa berlangsung (*How*) digambarkan melalui ancaman penutupan usaha, kesulitan memenuhi standar baru, kekhawatiran pasar ilegal, hingga rencana aksi protes dari aktivis dan gugatan hukum.
- Struktur Tematik : Kebijakan diberlakukan secara mendadak dan mengalami perubahan arah yang signifikan akibat dinamika perpecahan koalisi, sehingga berdampak pada sektor ekonomi.
- Struktur Retoris : Penggunaan kalimat "*Thrown into chaos*" menarasikan pembalikan kebijakan tersebut menyebabkan kekacauan pada ranah bisnis ganja. Adapun kalimat "*a medical certificate can absolutely be bought*" dari aktivis menyoroti potensi korupsi yang terjadi dalam bentuk resep dokter ilegal yang dapat dibeli untuk mengakali kebijakan.

### Analisis Berita 2

- Judul : Rule limits cannabis buds to medical use
- Ringkasan : Kementerian Kesehatan Thailand memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan resep medis untuk pembelian ganja serta mengklasifikasikannya sebagai

*controlled herb*. Pembatasan distribusi, kewajiban perizinan, dan keharusan pelaku usaha melibatkan tenaga medis menjadi sorotan dalam berita. Terdapat pula kritik dari aktor aktivis pro-legalisasi Writing Thailand's Cannabis Future Network terkait potensi celah dan arah kebijakan ke depan.

- Struktur Sintaksis : Judul langsung menekankan aspek pembatasan (*limits*) dan tujuan medis (*medical use*), yang mencerminkan sudut pandang regulatif dari pemerintah. Bagian lead berita langsung menonjolkan substansi kebijakan, yakni kewajiban resep untuk memperoleh bunga ganja. Kritik hadir di bagian akhir, bukan fokus utama berita.
- Struktur Skrip : Aktor (*Who*) utama adalah Kementerian Kesehatan Thailand, dengan peristiwa (*What*) berupa pemberlakuan regulasi yang membatasi penggunaan bunga ganja hanya untuk kepentingan medis. Adapun aktor lainnya adalah aktivis pro-legalisasi dari Writing Thailand's Cannabis Future Network yang menampilkan perspektif alternatif. Kebijakan ini berlaku segera setelah dipublikasikan dalam *Royal Gazette* dan diterapkan secara nasional (*When*). Lokasi terjadi di Thailand (*Where*). Alasan (*Why*) yang dikemukakan adalah untuk mencegah penyalahgunaan, sementara penerapannya (*How*) dilakukan melalui kewajiban resep medis, perizinan ketat, serta pembatasan distribusi.
- Struktur Tematik : Kebijakan baru dinarasikan sebagai bentuk pembatasan dan perbaikan dibandingkan kebijakan sebelumnya pada tahun 2022 yang melegalkan tanpa rincian lebih lanjut.
- Struktur Retoris : Didominasi diksi legal-teknokratis seperti "*regulated*", "*controlled herb*", "*prescription*", dan "*license*". Penggunaan diksi demikian mengonstruksikan bahwa kebijakan yang disahkan adalah rasional dan sudah melalui mekanisme yang sebagaimana mestinya.

### Analisis Berita 3

- Judul : Chafing under medical marijuana changes
- Ringkasan : Pelaku industri ganja merasakan keresahan dan kekesalan akibat pembalikan kebijakan yang terjadi. Pemerintahan Pheu Thai, melalui Somsak selaku Menteri Kesehatan, mengembalikan status ganja kepada penggunaan terbatas untuk medis. Kebijakan tersebut dinilai tergesa-gesa, sehingga menciptakan ketidakpuasan dan waktu adaptasi yang sempit bagi para pelaku usaha.
- Struktur Sintaksis : Judul "*Chafing under medical marijuana changes*" menandakan adanya ketidakpuasan dan tekanan yang dirasakan pelaku usaha. *Lead* berita langsung menampilkan respons dari pemilik usaha dan pekerja yang mengeluhkan perubahan regulasi yang mendadak serta dampak ekonominya, sehingga sejak awal fokus diarahkan pada konsekuensi kebijakan, bukan pada justifikasi pemerintah. Penjelasan pemerintah hadir hanya sebagai pelengkap konteks kejadian.
- Struktur Skrip : Aktor utama (*Who*) yang ditonjolkan adalah pelaku usaha dan pekerja di toko ganja, seperti pemilik usaha dan karyawan yang secara langsung menyampaikan pengalaman mereka. Peristiwa yang diberitakan (*What*) berfokus pada respons, keluhan, serta upaya adaptasi para pelaku usaha terhadap perubahan yang terjadi. Aspek waktu (*When*) ditunjukkan melalui situasi pasca-penerapan aturan baru yang berdampak secara langsung dalam waktu singkat, sementara lokasi (*Where*) terpusat pada toko-toko ganja di Bangkok. Alasan yang diangkat (*Why*) lebih diarahkan pada keresahan pelaku usaha akibat perubahan yang mendadak dan membebani operasional, sedangkan bagaimana peristiwa berlangsung (*How*) digambarkan melalui pengalaman nyata dari para pengusaha, mencakup kenaikan biaya, penutupan sementara usaha, hingga penyesuaian terhadap persyaratan baru.
- Struktur Tematik : Pengalaman dan respons pelaku usaha ganja terhadap pembalikan kebijakan yang terjadi.

- Struktur Retoris : Penggunaan diksi “*chafing*” pada judul mengindikasikan gesekan atau ketidakpuasan terhadap perubahan yang terjadi. Penggunaan ungkapan seperti “*the impact is immense*”, “*prices jumped dramatically*”, dan “*the government announcement was sudden*” memperkuat kesan bahwa perubahan tersebut membawa dampak besar dan terjadi secara mendadak.

#### Analisis Berita 4

- Judul : Medical clinics to replace cannabis dispensaries
- Ringkasan : Gerai penjualan ganja harus bertransformasi menjadi klinik medis jika ingin tetap menjalankan bisnisnya. Hal demikian dapat melalui mekanisme pemenuhan persyaratan seperti kehadiran tenaga medis, registrasi sebagai fasilitas kesehatan, serta penggunaan resep untuk distribusi produk, yang menandakan perubahan arah industri menuju sistem yang lebih terkontrol.
- Struktur Sintaksis : Judul “*Medical clinics to replace cannabis dispensaries*” menggambarkan diperlukannya transformasi industri ganja dari gerai ataupun kafe menjadi klinik sebagai konsekuensi dari kebijakan terbaru. Pada bagian *lead*, didominasi oleh pernyataan pejabat pemerintah, yakni kepala departemen, sehingga sejak awal *framing* diarahkan pada otoritas institusional sebagai sumber utama informasi.
- Struktur Skrip : Aktor yang ditonjolkan (*Who*) adalah pejabat dari Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand. Peristiwa (*What*) berfokus pada perubahan arah operasional dispensary yang harus bertransformasi menjadi klinik medis agar tetap beroperasi. Waktu (*When*) yang ditunjukkan adalah target implementasi dalam beberapa bulan ke depan serta tenggat perpanjangan izin pada bulan November. Lokasi (*Where*) berada dalam konteks nasional Thailand. Alasan (*Why*) lebih disampaikan secara implisit melalui kebutuhan pengetatan dan pengaturan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Peristiwa dinarasikan (*How*) sebagai langkah administratif lanjutan dari kebijakan terbaru terkait pengetatan ganja, dan penjelasannya secara bertahap dari kewajiban kehadiran tenaga medis, registrasi sebagai fasilitas kesehatan, serta mekanisme resep.
- Struktur Tematik : Transformasi institusional industri ganja menuju sistem medis yang lebih terkontrol.
- Struktur Retoris : Didominasi kalimat teknokratis seperti “*registered as a hospital or clinic*” dan “*required to access*”. Digunakannya kalimat tersebut membentuk nuansa penekanan kepatuhan akan kebijakan terbaru. Ungkapan dari pejabat seperti “*otherwise, they won't be able to sell it*” juga memberikan tekanan normatif yang tegas terhadap pelaku usaha.

#### Analisis Berita 5

- Judul : Cannabis changes 'harm economy'
- Ringkasan : Protes dilangsungkan di lingkungan Kementerian Kesehatan Thailand pada 7 Juli 2025. Kebijakan baru itu dinilai tergesa-gesa dan merugikan industri ganja secara drastis. Dampak pada industri dan aktivisme pro-legalisasi menjadi sorotan yang dominan. Selain itu, perdebatan atas dampak sosial menjadi pelengkap konteks.
- Struktur Sintaksis : Dapat ditelusuri pada judul terdapat penekanan pembalikan kebijakan yang mengakibatkan dampak buruk pada sektor ekonomi. Bagian *Lead* kemudian memperkuat arah tersebut dengan menampilkan aksi protes oleh aktivis ganja, sehingga sejak awal berita dibingkai melalui perspektif kelompok yang merasa dirugikan.
- Struktur Skrip : Aktor utama (*Who*) yang ditonjolkan adalah aktivis ganja, pelaku industri, dan akademisi. Peristiwa (*What*) difokuskan pada aksi protes dan kekhawatiran terhadap kondisi industri ganja. Waktu (*When*) merujuk pada momentum aksi yang akan berlangsung serta situasi pasca-dekriminalisasi. Lokasi (*Where*) berada di Thailand, khususnya di

Kementerian Kesehatan. Alasan (*Why*) dikaitkan dengan potensi kerugian ekonomi, ketidakpastian usaha, dan dugaan adanya kepentingan politik tertentu. Terjadinya peristiwa tersebut (*How*) dijabarkan melalui mobilisasi protes, penyampaian kritik, serta adanya argumentasi akademis berbasis data.

- Struktur Tematik : Dampak negatif terhadap ekonomi dan keberlangsungan industri ganja.
- Struktur Retoris : Penggunaan diksi seperti “*economic fallout*” dan “*conflicts of interests*” menekankan kesan negatif terhadap situasi yang terjadi. Kemudian, penggunaan data statistik serta kutipan aktivis dan akademisi memperkuat argumen serta membangun kesan bahwa dampak yang ditimbulkan bersifat luas dan signifikan.

### Analisis Berita 6

- Judul : Pro-cannabis rally ends, but they'll be back
- Struktur Sintaksis : Judul “*Pro-cannabis rally ends, but they'll be back*” menerangkan keberlanjutan aksi melalui frasa “they'll be back”, yang memberikan kesan bahwa gerakan advokasi oleh para aktivis pro-legalisasi masih aktif. Bagian *lead* langsung menyampaikan bahwa demonstrasi telah berakhir, tetapi akan dilanjutkan kembali, sehingga fokus awal diarahkan pada persoalan aksi dan komitmen kelompok pro-legalisasi.
- Struktur Skrip : Aktivis dan advokat pro-legalisasi menjadi aktor dominan (*Who*), dengan pemerintah sebagai pihak yang dituntut. Peristiwa (*What*) berfokus pada berakhirnya aksi demonstrasi dan rencana kelanjutannya. Waktu terjadinya peristiwa (*When*) mencakup aksi yang baru saja selesai setelah berlangsung selama dua hari, serta rencana aksi lanjutan yang direncanakan akan dilangsungkan pada minggu berikutnya. Tempat berlangsungnya peristiwa (*Where*) dalam berita tersebut berada di lingkungan Kementerian Kesehatan di Nonthaburi. Alasan (*Why*) adanya peristiwa tersebut dikaitkan dengan tuntutan untuk mengembalikan aturan sebelumnya dan kekhawatiran terhadap ketidakadilan. Terakhir, peristiwa digambarkan (*How*) melalui aksi demonstrasi, menginap di lokasi, serta penyampaian tuntutan secara terbuka.
- Struktur Tematik : Persistensi gerakan pro-legalisasi ganja dan konflik kepentingan dalam industri ganja.
- Struktur Retoris : Diksi seperti “*demand*”, “*opposed*”, “*suspected*”, dan “*continue until*” menegaskan ketahanan gerakan dan ketidakpuasan. Adapun kalimat “*they'll be back*” menjadi elemen kunci yang membangun kesan perlawanan.

### Analisis Berita 7

- Judul : Cannabis curbs 'won't lead to monopoly'
- Ringkasan : Terdapat perdebatan antara pemerintah dengan aktivis pro-legalisasi mengenai kebijakan terbaru dan dampaknya bagi kelangsungan ekonomi. Pemerintah mengatakan bahwa tanpa aturan yang jelas, sebagaimana kondisi sebelum adanya kebijakan terbaru, justru berpotensi memberikan celah bagi para pelaku usaha untuk mendominasi pasar ganja dengan cara apapun. Sedangkan, menurut aktivis pro-legalisasi mengemukakan kekhawatiran ganja dikembalikan menjadi golongan narkotika dan menghambat aksesnya bagi keperluan yang tidak bisa dilingkupi oleh surat dokter. Selain itu, disoroti pula temuan jual-beli surat izin medis senilai 500 ribu baht, yang meningkatkan keraguan akan efektivitas dari kebijakan terbaru.
- Struktur Sintaksis : Kalimat “*won't lead to monopoly*” pada judul membingkai isu sebagai perdebatan tentang potensi monopoli. Pada bagian *Lead* langsung menampilkan bantahan dari Menteri Kesehatan terhadap tuduhan tersebut, sehingga struktur awal berita berangkat dari perspektif pemerintah. Namun, dalam tubuh berita, narasi kemudian berkembang dengan memasukkan suara kelompok advokasi yang memprotes dan mengkritik situasi,

sehingga secara sintaksis terjadi keseimbangan porsi narasi di antara dua pihak, meskipun pada bagian pembukaannya cenderung kepada klarifikasi pemerintah.

- Struktur Skrip : Kementerian Kesehatan, aktivis pro-legalisasi, dan pelaku usaha terdampak menjadi aktor (*Who*) dalam berita. Peristiwa (*What*) berfokus pada perdebatan publik yang mencakup bantahan dari pemerintah, kritik dan aksi protes dari aktivis serta pelaku usaha. Waktu (*When*) dijelaskan berada saat terjadinya demonstrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Lingkungan Kementerian Kesehatan menjadi lokasi berlangsungnya peristiwa (*Where*). Peristiwa tersebut dilandasi (*Why*) pada kekhawatiran mengenai dominasi pasar, ketidakadilan, serta potensi dampak ekonomi yang buruk. Peristiwa terjadi (*How*) melalui pertukaran pernyataan, aksi demonstrasi, penyampaian petisi, serta argumen dari kedua belah pihak.
- Struktur Tematik : Kontestasi narasi antara pemerintah dan kelompok aktivis terkait dampak situasi industri ganja.
- Struktur Retoris : Penggunaan kalimat dalam tanda kutip seperti “*won’t lead to monopoly*” dan “*moderate approach*” memberi kesan defensif dari pihak pemerintah. Sementara itu, diksi dari kelompok aktivis seperti “*black market*” dan “*undue powers*” memperkuat nuansa ketidakpercayaan dan resistensi. Penyajian angka (nominal harga pada transaksi jual beli sertifikasi klinik medis misalnya) digunakan untuk memperkuat argumen aktivis.

### Analisis Berita 8

- Judul : Group seeks axing of new rules 'favouring big players'
- Ringkasan : Aksi protes dilangsungkan oleh kelompok aktivis pro-legalisasi ganja Writing Thailand's Cannabis Future Network. Demonstrasi tersebut dilatari oleh kebijakan baru yang berbalik membatasi ganja hanya pada keperluan medis tanpa ada waktu untuk beradaptasi. Pada dasarnya kebijakan tersebut dinilai merugikan petani dan pengusaha kecil, sehingga massa aksi menuntut pencabutan kebijakan.
- Struktur Sintaksis : Judul “*Group seeks axing of new rules 'favouring big players'*” secara langsung mempertontonkan potensi ketimpangan, terutama pada kalimat ‘*favouring big players*’, yang dinilai oleh aktivis sebagai dampak dari kebijakan pembatasan konsumsi ganja yang disahkan. Pada bagian *Lead* dilanjut dengan ditampilkannya tuntutan kelompok aktivis dan peringatan tentang potensi monopoli serta kerugian bagi pelaku kecil. Aksi protes beserta berbagai macamuntutannya menjadi narasi dominan dalam berita, sedangkan pernyataan pemerintah berada di akhir dan tidak mencolok.
- Struktur Skrip : Kelompok advokat ganja dan pelaku usaha kecil, dengan pemerintah sebagai pihak yang dituntut dan dikritik menjadi aktor yang disorot (*Who*). Aksi protes menjadi fokus dalam pemberitaan (*What*). Waktu peristiwa (*When*) adalah pada aksi yang sedang berlangsung dan tenggat waktu tuntutan (hingga akhir Juli) serta rencana aksi pada Agustus. Lingkungan Kementerian Kesehatan menjadi tempat berlangsungnya peristiwa (*Where*). Berlangsungnya peristiwa (*How*) terjadi melalui adanya aksi protes, pernyataan publik, ancaman laporan ke lembaga anti-korupsi, dan mobilisasi aksi lanjutan.
- Struktur Tematik : Ketimpangan dan potensi monopoli dalam industri ganja akibat pembalikan kebijakan.
- Struktur Retoris : Digunakannya kalimat-kalimat seperti “*favouring big players*”, “*complete monopoly*”, dan “*harm small operators*” menciptakan kesan ketidakadilan dan ancaman terhadap pelaku usaha kecil. Kemudian, diksi seperti “*immediately scrap*”, “*warned*”, dan “*locking them out*” memperkuat nuansa urgensi dan konflik.

### Analisis Berita 9

- Judul : Weed networks still fuming

- Ringkasan : Jaringan aktivis pro-legalisasi ganja mengajukan petisi ke Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) terhadap Menteri Kesehatan Somsak Thepsuthin terkait regulasi ganja 2025 yang dinilai tidak adil. Kebijakan baru tersebut dituding lebih menguntungkan investor besar daripada petani kecil serta kurang transparannya sistem sertifikasi.
- Struktur Sintaksis : Penggunaan diksi “*fuming*” yang berarti “kegeraman” pada judul langsung menonjolkan betapa marahnya aktivis dan pengusaha serta petani ganja skala kecil atas kebijakan terbaru. Pada bagian lead berfokus pada tindakan hukum (petisi ke NACC) dan tuduhan spesifik bahwa regulasi tersebut dibuat untuk "menyenangkan investor" (*please investors*). Bagian isi didominasi oleh tindakan aktivis, sementara pernyataan pemerintah di akhir sebagai pelengkap konteks.
- Struktur Skrip : Aktivis dari Writing Thailand’s Cannabis Future Network menjadi aktor utama (*Who*). Peristiwa (*What*) merupakan pengajuan petisi penyelidikan Menteri Kesehatan ke NACC oleh kelompok aktivis. Peristiwa terjadi (*When*) pada 29 Juli, tepat saat dilangsungkannya pengajuan petisi. Adanya dugaan ketidakadilan kebijakan yang memihak investor besar dan mengabaikan perlindungan kelompok rentan serta petani kecil (*Why*). Kejadian terjadi di kantor NACC (*Where*). Peristiwa dilaksanakan (*How*) dengan melalui jalur hukum formal dan kampanye publik mengenai kerugian ekonomi petani.
- Struktur Tematik : Pembalikan kebijakan yang terjadi adalah sebuah kemunduran.
- Struktur Retoris : Penggunaan diksi “*Fuming*” menyatakan adanya kemarahan yang meluap dan sangat serius. Kemudian, kalimat “*To please investors*” (Menyenangkan investor) memiliki konotasi negatif yang menyiratkan keberpihakan pada kapitalisme besar ketimbang kesejahteraan rakyat. Kalimat “*Unethical conduct*” (Perilaku tidak etis) memberikan cap langsung mengenai diragukannya integritas sang menteri.

### Analisis Berita 10

- Judul : Pro-cannabis group wants Somsak axed
- Ringkasan : Jaringan aktivis pro-legalisasi ganja mengajukan petisi ke Kantor Perdana Menteri pada hari Rabu untuk mendesak pemecatan Menteri Kesehatan Somsak Thepsuthin. Kelompok tersebut menuduh menteri melakukan praktik diskriminatif, melanggar kode etik, dan sengaja menciptakan regulasi yang tidak transparan guna menguntungkan kelompok bisnis tertentu sembari menghancurkan mata pencaharian 20.000 pengusaha ganja berlisensi.
- Struktur Sintaksis : Penggunaan kata “*axed*” (dipecat) pada judul langsung menempatkan konflik pada level jabatan dan personal. Pada bagian lead berita, langsung menyoroti lokasi (Kantor Perdana Menteri) dan tuntutan utama (pemecatan). Hal demikian menunjukkan bahwa masalah ini sudah naik ke level pemerintahan tertinggi. Pernyataan dari aktivis yang meminta digantinya menteri Somsak beserta kritik atas kebijakan tersebut di akhir mendominasi isi berita, dengan penjelasan terkait isi kebijakannya sebagai pelengkap.
- Struktur Skrip : Jaringan pro-legalisasi ganja sebagai aktor utama (*Who*). Peristiwa yang terjadi adalah permintaan pemecatan Menteri Kesehatan (*What*). Peristiwa terjadi (*When*) pada hari Rabu, tepat setelah pengiriman petisi ke NACC pada sehari sebelumnya. Kantor Perdana Menteri sebagai lokasi kejadian (*Where*). Terjadinya peristiwa disebabkan (*Why*) oleh ketidakpuasan atas pembalikan kebijakan. Peristiwa terjadi (*How*) melalui adanya penyerahan petisi resmi sebagai bentuk tekanan politik kepada PM.
- Struktur Tematik : Pembalikan kebijakan yang ditengarai ingin membangun monopoli dan mematikan usaha kecil
- Struktur Retoris : Penggunaan diksi yang cukup provokatif seperti pemecatan (*axed*), pembersihan (*crackdown*), dan tidak transparan (*opaque*). Adanya pelekatan cap tidak adil

dan ketiadaan integritas pada Menteri Kesehatan, melalui istilah "*Discriminatory practices*" dan "*Violating ethical code*".

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada masing-masing berita, ditemukan pola *framing* dari Bangkok Post atas isu pembalikan kebijakan ganja. Terdapat tujuh berita yang memiliki kecenderungan narasi yang mengkritisi kebijakan, tiga berita lainnya menekankan pada narasi kebijakan yang teknokratis dan rasional serta pernyataan dari pemerintah. Lantas, peneliti akan menjabarkan berdasarkan mekanisme teoritis dari Pan & Kosicki atas pola-pola yang terbentuk, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya pada masing-masing berita.

Pada struktur sintaksis, mayoritas berita yang fokus pada menampilkan korban dari pembalikan kebijakan, di bagian judul cenderung menggunakan diksi yang tendensius. Sedangkan pada berita yang fokus merepresentasikan pandangan pemerintah, diksi yang digunakan dalam judul condong ke arah teknokratis dan rasional. *Lead* juga berfokus pada pengalaman dari pelaku usaha dan divalidasi oleh aktivis pro-legalisasi, sedangkan pada berita yang berfokus pada pendapat pemerintah lebih kepada penjelasan terkait kebijakan tersebut dan ada juga sedikit pernyataan dari pejabat terkait.

Selanjutnya pada skrip, seluruh berita menampilkan komponen 5W (*Who, What, When, Where, dan Why*) serta 1H (*How*) secara lengkap dan jelas. Namun, penonjolan dari komponen tersebut cenderung menitikberatkan pada *Who* yakni aktornya serta *How* mengenai bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Selain itu komponen lain tetap dijelaskan, tetapi menjadi pelengkap konteks dari pemberitaan.

Adapun tema pada masing-masing berita beragam tergantung pada *framing* yang dibentuk. Pada berita yang fokusnya menampilkan pelaku usaha dan aktivis, *framing* yang dibentuk adalah dampak dari kebijakan tersebut yang menimbulkan keresahan pengusaha dan petani ganja yang berskala kecil, serta kritik dari aktivis yang menysasar pada pemerintah. Sementara itu, berita yang merepresentasikan perspektif pemerintah cenderung memusatkan perhatian pada aspek teknis kebijakan, mekanisme regulasi, serta klarifikasi pemerintah terhadap kritik dan aksi protes yang muncul.

Terakhir pada struktur retorik, berita yang menjadikan pelaku usaha serta aktivis sebagai fokus menggunakan diksi dan frasa yang memancing atensi pembaca. Sedangkan pada berita yang memaparkan pernyataan pemerintah, digunakan kalimat yang netral dan teknokratis, bahkan kadang cenderung kepada klarifikasi semata.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan, dapat terlihat pemosisian media Bangkok Post dalam membangun *framing* melalui narasi terkait isu kebijakan tersebut. Melalui empat kerangka teori *framing* Pan & Kosicki (1993), dapat menjelaskan posisi Bangkok Post yang berada dalam spektrum media yang membangun *framing* melalui narasi yang mengkritisi kebijakan. Struktur dari teori yang dominan dalam pembentukan *framing* tersebut adalah retorik. Hal demikian dapat ditelusuri dengan adanya ketimpangan pemakaian diksi antara dua sisi berita, terutama dalam judul berita. Selain itu, pada struktur skrip, terutama pada komponen 5W+1H, aktor (*who*) yang ditonjolkan dalam berita menjadi komponen yang menentukan arah konstruksi *framing* dalam berita.

Secara keseluruhan, *framing* yang dimuat oleh Bangkok Post adalah bahwa kebijakan tersebut memiliki masalah yang amat fatal, mulai dari kebijakan yang digambarkan tergesa-gesa dan sarat dengan kepentingan politik, yang pada akhirnya tidak memberikan banyak waktu bagi pihak yang terdampak untuk beradaptasi, utamanya terkait perkara lisensi yang berlapis. Keluhan pelaku usaha mengenai regulasi yang mendadak tersebut sesuai dengan dokumen kebijakan *Ministerial Regulation on Controlled Herbal Plants (Cannabis) B.E. 2568 (2025)*. Kebijakan tersebut langsung dinyatakan berlaku pada tanggal 26 Juni 2025 tanpa memuat klausul mengenai masa transisi (*grace period*) yang memadai bagi penyesuaian izin operasional

usaha. Namun demikian, *framing* teknokratis yang muncul pada sebagian kecil berita juga selaras dengan arah kebijakan yang tercatat dalam ASEAN Drug Monitoring Report, yang memang menekankan pentingnya regulasi ketat berbasis resep medis untuk mencegah penyalahgunaan.

Hasil analisis juga mengonfirmasi argumen Cook (2005) yang menyatakan bahwa media berfungsi sebagai agen politik yang secara aktif membangun *framing* dengan susunan narasi tertentu melalui penekanan teks. Dalam hal ini, penekanan teks yang dimaksud dominan pada timpangnya diksi yang dipakai antara berita yang menampilkan pemerintah yang cenderung teknokratis, dan diksi emosional yang digunakan pada berita yang menyoroti kelompok terdampak atas pembalikan kebijakan yang terjadi.

Selain itu, dominasi pemberitaan mengenai protes, keberatan pelaku usaha, serta aksi demonstrasi yang muncul dalam pemberitaan Bangkok Post menunjukkan adanya ketidakpuasan kelompok terdampak terhadap proses formulasi kebijakan pembatasan ganja di Thailand tahun 2025. Dalam perspektif Arnstein (1969), kondisi demikian mengindikasikan bahwa partisipasi kelompok terdampak cenderung berada pada level tokenism bahkan non-participation, sebab aspirasi pelaku usaha dan kelompok advokasi tidak tampak memiliki pengaruh substantif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Situasi demikian juga dapat ditinjau melalui perspektif demokrasi deliberatif Habermas dalam Haliim (2016) yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipatif dalam ruang publik sebagai dasar pembentukan kebijakan publik. Akan tetapi, *framing* yang dibangun Bangkok Post justru memperlihatkan kesan bahwa kebijakan diterapkan secara *top-down* dan minim deliberasi dengan kelompok terdampak, sehingga memunculkan resistensi publik, aksi protes, serta tuduhan bahwa kebijakan lebih merepresentasikan kepentingan politik dan ekonomi tertentu dibandingkan hasil konsensus bersama.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis *framing* terhadap sepuluh berita Bangkok Post mengenai pembatasan konsumsi ganja di Thailand tahun 2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bangkok Post memiliki kecenderungan posisi yang kritis terhadap pembalikan kebijakan tersebut. Kecenderungan tersebut terlihat bahwa 7 dari 10 berita yang diterbitkan dalam periode yang ditentukan menonjolkan kelompok terdampak, terutama pelaku usaha dan aktivis pro-legalisasi, dibandingkan 3 berita lainnya yang menampilkan pihak pemerintah dengan narasi yang deskriptif dan legal-teknokratis. Kemudian, berdasarkan perangkat analisis dalam teori *framing* Pan dan Kosicki, struktur skrip dan retorik menjadi elemen yang paling dominan dalam membangun kecenderungan *framing* tersebut. Dominasi tersebut terlihat pada penonjolan aktor tertentu dalam unsur *who* sebagai bagian dari struktur skrip, serta penggunaan diksi yang emosional dan narasi krisis sebagai bagian dari struktur retorik.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai aktor yang sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang dapat membangun kecenderungan posisi tertentu melalui proses konstruksi *framing*. Bangkok Post tidak hanya merepresentasikan dinamika kebijakan publik yang terjadi, tetapi turut mengonstruksikan narasi yang kritis terhadap kebijakan pembatasan konsumsi ganja di Thailand. Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan untuk mengetahui dinamika politik di Thailand, terutama pada ranah media. Selain itu pula, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi pemangku kebijakan untuk melihat dampak yang berpotensi terjadi dari kebijakan yang hendak diterapkan.

Kemudian, bilamana melihat gambaran besarnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cara media mengemas sebuah berita tidak pernah benar-benar netral atau bebas dari pengaruh politik di sekitarnya. Dengan menggabungkan teori pembedaan Pan dan Kosicki bersama dengan konsep tangga partisipasi masyarakat milik Arnstein dan demokrasi deliberatif

Habermas, dapat dilihat dengan jelas pola dari Bangkok Post yang menggunakan pengaruhnya untuk mengkritisi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada akhirnya, aturan baru yang membatasi ganja pada tahun 2025 tidak lagi dipandang sekadar sebagai regulasi kesehatan biasa. Kebijakan ini dinilai sebagai produk hukum yang kurang matang karena diputuskan secara sepihak dari atas tanpa melibatkan diskusi yang terbuka dan adil dengan kelompok yang paling terdampak. Melalui pendekatan berita yang kritis demikian, Bangkok Post membuktikan perannya yang lebih dari sekadar koran harian, melainkan sebagai pilar demokrasi yang berpartisipasi mengawal jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan pihak yang terdampak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada objek kajian yang hanya berfokus pada satu media, yakni Bangkok Post, serta pada rentang waktu pemberitaan yang terbatas pada periode awal pembalikan kebijakan ganja tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan *framing* antar media di Thailand, baik media berbahasa Thailand maupun media internasional, guna melihat perbedaan kecenderungan konstruksi *framing* terhadap isu kebijakan ganja. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti analisis wacana kritis atau analisis resepsi audiens untuk memahami bagaimana *framing* media memengaruhi pembentukan opini publik terhadap kebijakan tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Amina, N. W. R., Satriya, B., & Sadono, T. P. (2024). The Dilemma of Cannabis Prohibition in the Frame of Kompas TV (Analysis by Robert N Entman of the Talk Show Episode of Ganja: Myths and Facts on February 6, 2020). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i27.17099>
- Arafat, G. Yasser. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Alhadharah : Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 32–48. <http://images.andamawara.multiply.Multiplycontent.com/attachment/0>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bangkok Post. (2025a, Juni 26). Thai cannabis industry thrown into chaos. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3058697/thai-cannabis-industry-thrown-into-chaos-as-government-aims-to-recriminalise-weed>
- Bangkok Post. (2025b, Juni 27). Rule limits cannabis buds to medical use. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3058860/rule-limits-cannabis-buds-to-medical-use>
- Bangkok Post. (2025c, Juli 2). Chafing under medical marijuana changes. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/3061900/chafing-under-medical-marijuana-changes>
- Bangkok Post. (2025d, Juli 3). Medical clinics to replace cannabis dispensaries. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3062278/medical-clinics-to-replace-cannabis-dispensaries>
- Bangkok Post. (2025e, Juli 7). Cannabis changes “harm economy.” *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3064406/cannabis-changes-harm-economy>
- Bangkok Post. (2025f, Juli 8). Cannabis curbs “won’t lead to monopoly.” *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3064782/cannabis-curbs-wont-lead-to-monopoly>

- Bangkok Post. (2025g, Juli 8). Pro-cannabis rally ends, but they'll be back. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3065412/pro-cannabis-rally-ends-but-theyll-be-back>
- Bangkok Post. (2025h, Juli 18). Group seeks axing of new rules “favouring big players.” *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3071220/group-seeks-axing-of-new-rules-favouring-big-players>
- Bangkok Post. (2025i, Juli 30). Weed networks still fuming. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3077861/weed-networks-still-fuming>
- Bangkok Post. (2025j, Juli 31). Pro-cannabis group wants Somsak axed. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3078633/pro-cannabis-group-wants-somsak-axed>
- Charoenwisedsil, R., Pisutsan, P., & Matsee, W. (2023). Revisiting Thailand’s cannabis legislation. *Journal of Travel Medicine*, 30(4). <https://doi.org/10.1093/jtm/taad004>
- Cook, T. E. (2005). *Governing with the news: The news media as a political institution*. University of Chicago Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fourth). SAGE Publications.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1–37.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 1(42), 19–30.
- Head, J. (2023, Juni 23). *Bisnis ganja di Thailand memicu lapangan kerja bagi ribuan orang, namun dikhawatirkan “merusak masyarakat.”* BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgln1p21xepo>
- Indriani, E. R., & Madjid, A. (2022). The legalization of medical cannabis: A comparative approach of the Thai Narcotics Act BE 2522 (1979). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3), 638–643. <https://doi.org/10.38142/ijess.v3i3.262>
- Laohavanich, M. (2022). Political economy of cannabis in Thailand. *Chulalongkorn Medical Journal*, 66(1), 115–122. <https://doi.org/10.58837/CHULA.CMJ.66.1.11>
- Lertrujwanich, S., Bisonyabut, N., & Tantisana, W. (2024). *The economic benefits of cannabis*. <https://tdri.or.th/en/2024/06/the-economic-benefits-of-cannabis/>
- Maida, S. T., Enrieco, E., Sartika, R., Pranawukir, I., & Alamsyah, A. (2025). Konstruksi “Bocor Alus Politik” Tempodotco terhadap Manajemen Komunikasi Pemerintahan Prabowo. *Jurnal Cyber PR*, 5(2), 97–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/cyberpr.v5i2.6509>
- Masyhadi, A. R. (2024). *Transformasi kebijakan narkotika: Analisis faktor yang mempengaruhi legalisasi ganja sebagai langkah desekuritisasi di Thailand* [Bachelor Thesis]. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (edisi ke-7 (7 ed.)). Pearson Education Limited.
- Nielsen, R. K., Newman, N., Fletcher, R., & Kalogeropoulos, A. (2025). *Reuters Institute Digital News Report 2025*. Reuters Institute.
- Office Narcotics Control Board. (2025). *ASEAN Drug Monitoring Report 2024*. ASEAN Training Center for Preventive Drug Education. <https://aseannarco.oncb.go.th/uploads/Ebook/pdf/1853468687403184.pdf>
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75.